

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

JI. ZA. Pagar Alam, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung (35144) Komplek Terminal Tipe A Rajabasa Telp: (0721) 5605219 Fax: (0721) 5605219 e-mail :bptdlampung06@g mail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Nomor: KP-BPTD.KLS II.LPG 6 Tahun 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Menimbang

- : 1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
 - 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung tentang Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
 - 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
 - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
- 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
- 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG TAHUN 2025.

Pertama

: Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

Kedua

: Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung untuk menetapkan:

- a. Rencana kinerja tahunan;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Ketiga

: Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keempat

: Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:

- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Perjanjian Kinerja sebagaimaan dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

Kelima

: Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Keenam

Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada fanggal : 20 Januari 2025

It. Kepala BPTD Kelas II Lampung,

DDI SANTOSO, S.Si.T., M.M.Tr.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Lampung Nomor: KP-BPTD.KLS II.LPG 6 Tahun 2025

Tanggal : 20 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Sasaran Kegiatan		Inc	likator Kinerja			TARGET				
Sasa	aran Kegiatan		Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100	100	100
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe- A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	2	3	2
	Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	3	3	4	
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80	80	80	80	80	80
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terdahap Kondisi Ideal	%	80	80	80	80	80	80
		IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	13	1	0	21	0	0
SK4		IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	-	2000	1000	1000	1000	1000
		IKK 7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Motor	%	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8

C	ovan Konistan	Inc	likator Kinerja				TAR	GET		
Sas	aran Kegiatan		Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggara an Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80	80	80	80	80	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggara an Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	83,9	83,96	83,98	84	84

PERHUBUAN TO Kelas II Lampung,

BUDL SAMOSO, S.Si.T., M.M.Tr.

Lampiran II Keputusan Kepala BPTD Kelas II Lampung

Nomor : KP-BPTD.KLS II.LPG 6 Tahun 2025

Tanggal : 20 Januari 2025

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS KEGIATAN					
	INFRASTRUKTUR KONER SASARAN KEGIATAN		TRANSPORTASI DARAT NDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan nasional		

DEFINISI

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan dalam pelayanan angkutan perintis adalah tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan, untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel

berikut: Provinsi Lampung

- 1. Pringsewu Sendang Agung
- 2. Daya Murni SP. Propau
- 3. Rajabasa Jabung
- 4. Bandar Jaya Sulusuban-Padang Ratu-Kalirejo
- 5. Margomulyo-Karanganyar-Natar (Simpang Tiga RS Medika Natar)
- 6. Liwa Kebon Tebu
- 7. PS Panarangan Jaya Negara Batin

SUMBER DATA

- Direktorat Angkutan Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CARA MENGHITUNG

 $\frac{\textit{Realisasi Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis}}{\textit{Rencana Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis}} x 100\%$

SATUAN

% (persentase)

TARGET					
2021	2022	2023	2024	2025	
100	100	100	100	100	

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

	PROGRAM						
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
	KEGIATAN						
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT						
	SASARAN KEGIATAN	I	NDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi				

Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi.

BPTD Kelas II Lampung memiliki 1 (Satu) Terminal Tipe A yang beroperasi yaitu Terminal Tipe-A Rajabasa, dan 1 (Satu) Terminal yang tidak Beroperasi yaitu Terminal Betan Subing

Terminal Tipe-A Rajabasa Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kota Bandar Lampung. Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan (ANGKOT).

SUMBER DATA

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darateroperasi
- Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Rajabasa dan Betan Subing

CARA MENGHITUNG

Jumlah Total Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

SATUAN

Lokasi

	TARGET						
Γ	2021	2022	2023	2024	2025		
	2	2	2	3	2		

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CATATAN

	PROGRAM					
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT						
	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi			
DEFINISI						

Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyebrangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyebrangan kelas I, II, III. Sedangkan pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpulan dan pengumpan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Lampung terdapat Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

SUMBER DATA

- Direktorat TSDP
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni

CARA MENGHITUNG

Jumlah Total Pelabuhan yang sudah beroperasi

SATUAN						
Lokasi						
	TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024		
2 2 3 3 4						
	PENANGGUNG JAWAB					

- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CATATAN

	PROGRAM					
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
	KEGIATAN					
	PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP			

BPTD Kelas II Lampung memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, kemanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalan penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Pelabuhan yang kondisinya baik terhadap Jumlah Pelabuhan SDP.

Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan	Uraian
	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
SPM Pelayanan Penumpang SPM Pemuatan Kendaraan	Aspek Kenyamanan
3. SPM Pengoperasian Kapal	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesetaraan
	Aspek Keteraturan

SUMBER DATA

- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CARA MENGHITUNG

Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM
Jumlah Pelabuhan yang dipantau

SATUAN

% (Persentase)

TARGET						
2021	2022	2023	2024	2025		
80	80	80	80	80		

PENANGGUNG JAWAB

	PROGRAM					
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
	KEGIATAN					
	KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal			

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancarar lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :

- 1) Alat Penerangan Jalan;
- 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
- 3) Marka Jalan;
- 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 5) Paku Jalan;
- 6) Rambu Lalu Lintas;
- 7) Rambu Tiang Gawang;
- 8) Rambu Tiang F;
- 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
- 10) Pagar Pengaman Jalan;

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan

SUMBER DATA

- Direktorat Lalu Lintas Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

CARA MENGHITUNG

Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada Jalan di Provinsi Lampung Jaringan Jalan Nasional Lampung berdasarkan KP 290/KPTS/ M/ 2015 x100%

SATUAN

% (Persentase)

		TARGET		
2021	2022	2023	2024	2025
80	80	80	80	80

PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS KEGIATAN						
	KESELAMATAN DAN KEA SASARAN KEGIATAN		TRANSPORTASI DARAT NDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional			

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alas an keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah , maka ditetapkan untuk pelaksanaan Pembangunan Fasilitas keselamatan ZoSS BPTD Kelas II Lampung telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

SUMBER DATA

- Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CARA MENGHITUNG

Jumlah Total Ketersediaan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di Jalan Lampung

SATUAN

Lokasi

		TARGET		
2021	2022	2023	2024	2025
1	0	21	20	-

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

	PROGRAM							
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS							
	KEGIATAN							
	KESELAMATAN DAN KEA	AMANAN '	FRANSPORTASI DARAT					
	SASARAN KEGIATAN	II.	NDIKATOR KINERJA KEGIATAN					
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan					

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Tranportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

SUMBER DATA

- Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CARA MENGHITUNG

Jumlah Orang / Masyarakat yang tersosialisasi

SATUAN

Orang

		TARGET		
2021	2022	2023	2024	2025
2000	1.000	1.000	1.000	1.000

PENANGGUNG JAWAB

- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CATATAN

BPTD Kelas II Lampung memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan Sosialisasi keselamatan transportasi jalan yang mana merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Dalam hal ini tepatnya diselenggarakan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan beberapa kegitan seperti SALUD, Jalan Sehat dan Sepeda Santai yang diikuti oleh Masyarakat di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

	PROGRAM							
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS							
	KEGIATAN							
	KESELAMATAN DAN KEA	AMANAN '	FRANSPORTASI DARAT					
	SASARAN KEGIATAN	II	NDIKATOR KINERJA KEGIATAN					
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor					

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

SUMBER DATA

- Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CARA MENGHITUNG

Jumlah UPUBKB yang terakreditasi di Provinsi Lampung
Jumlah Total UPUBKB di Provinsi Lampung

SATUAN

% (Persentase)

		TARGET		
2021	2022	2023	2024	2025
74,8	74,8	74,8	74,8	74,8

PENANGGUNG JAWAB

- ✓ Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- ✓ Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

CATATAN

	PROGRAM								
	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS								
	KEGIATAN								
	PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT								
	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN							
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat						

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2022 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1. Penyusunan bahan RKA
- 2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
- 3. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;
- 4. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
- 5. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- 6. Kalibrasi alat uji;
- 7. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;
- 8. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9. Pengawasan Gakum;
- 10. Pengiriman Pegawai Diklat
- 11. Penyidikan dan pendampingan pasal 277 UU Tahun 2009
- 12. Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ

SUMBER DATA

- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Sub Bagian Tata Usaha

CARA MENGHITUNG

Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Target Persentase Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

-x100%

SATUAN

Nilai

TARGET								
2021	2022	2023	2024	2025				
80	80	80	80	80				

PENANGGUNG JAWAB

	PROGRAM							
	DUKUNGAN MANAJEMEN							
	KEGIATAN							
	PENUNJANG TEKN	NIS TRANS	PORTASI DARAT					
	SASARAN KEGIATAN	I	NDIKATOR KINERJA KEGIATAN					
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat					

- 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- 2. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Bagian Kepegawaian dan Umum dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
- 3. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung pada tahun 2022 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Managemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Lampung. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu:
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - Honorarium Satuan Kerja
 - Honorarium Pejabat Pengadaan
 - Gaji dan Tunjangan Pegawai

SUMBER DATA

- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
- Sub Bagian Tata Usaha

CARA MENGHITUNG

Persentase Tingkat Penyelenggaraan
Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
Target Persentase Tingkat Penyelenggaraan
Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

SATUAN

Nilai

TARGET							
2021	2022	2023	2024	2025			
83,9	83,96	83,98	84	84			

PENANGGUNG JAWAB

CASCADING SASARAN KINERJA POHON KINERJA

KORPHIALS PERSONNELS	Torrespondent Scanner of Name and Algebry	Management of the control of the con		National State of Sta		Mention tops Kastar in Addit Kelar in Addit Kelar in Addit Kelar in Addit Addition	Alter min-top a Realter top baleto President mg Each 10-yet				
OUTED PERSONAL PERSON	Conveyorage Exercises Search and Named BOT BOT BOT	Microsoftatop a Albertia Prior man Transportant ENPO L ENPO A ENPO A		Montagnatur Roselturatur Transportur FUELS BUTTE		Meather to pe Kenther for Action Kenther for Action Section to Section day for the sec-	New years to a Realther four Kindle Presente in Long Bulk North				
STREETS PRINCIPOLOGY						Montage terri Kantine Terri Kelah Ketijat in, rejelasi dan Haban BKKI da HKKI da	Managinase Broken diligen Periodongo y Book Abonesed BOOK o DOKAN	Moningharoon Kepatektas Name Antonion out Secretary Diggs Forberhangus Borne OKKS J	Menglettys Kapabilitis Kapabilitis Menglettys Menglettys Menglettys Perkelingus District MKA to BEKA36	Mexical Sandon Layman Kanadina Layman Kanadina Layman Kanadina Layman Kanadina Layman Printer Danie IKES In BERT IS	Moninghamore Kopabilition Morphismed for Literature Depti Parkadungan Depti 1880 J
THE LALCE LIPTING AND	Charles to the Transcript to the Marie Transcript to t			Medicalizates Kentur dan Teksan dan Eskat	Monte glastry i Knall or The Amparatus Internation to the Team act and Daniel 100-14		Montplement Blook-on-Diagna Personal-on-gas Exerce All monitors \$1,000-2	700			
MI LOGISTICALLIN	Meaning or Keepings of Topings of Mary the Bott parties Age to all BOLL to all BOLL to all		Maninghology of Smillion data Logistics (transportation Profession Services delays (million)		Meaning come a bloodle or Print printing action Distance or critical Drawn action Distance works.		Manager Appe Month of Appe Month of Tollars Production Design Advantage Tollars				
int propagato. Basementantal.co.	Manufacture Konstitution Franciscolori destroine Sono politice Address Lab (KKL-10-Lab (KKL-10-Lab	Memoryame a manufa Promotes Temporated Design (MCC) of and BCC) of		Marchine and Revision data Fallow from	Managerray Enadlms Page over garans their region lething frameworked David 1023-364		Shewaya seneral Basin and Copins Particular copins (Dayor All commission Basin and				
INTERNATION				Mentional and Resolvent and Delication of the State of th	Meningham a Shallen Penninggaran Dalaman rakala Prakaman adilah		Harings days Heat Hayee Parket region Barat Al conduct Historia				
MIL TRANSPORTABILITY SEE	Newton by Keenstrates Franciscost describes Section do Bolisto and Bolisto and Bolisto and	Medical and a fine for a fine fine for a fin		Manhaday Reviewing Traversal BUCAN ad HULLS	Mentag area (Bacillano) Pero agrapa Bakaran rakas Instrumental Direct Direct		Shedagh on a Direktoral Ships for shedagan Data - 15 maskel Ships - 55 maskel				
sincress				Weeking also A Keeking app Design stad Editor 7	biomagnotora Sandres Percentagnosas Redempercialis Etamografia Etamografia Bander		Meetingkomm a Birnskowel Ditjon Furnishmagan David Atlantation Skilling?				
gram.	Marchael Bern Bornell Ban France Ban Annel Ban Ketterpe dann dana Hamila Ball Sand Ball Sand	Manufaghange Khange Pengenah Terangantan Barat IKKLAs ad IKKLAS		Marchaelano Esperantes Esperantes SCREEN AND ESPERANTES	Mortagramma Kaalilan Penyimpen salam Bahangan salam Immerina Dang MASA		Moving trans Ottobran Digos Prinskaugus Trans (Anabols) 103045				

BPTD KELAS II LAMPUNG

IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDF
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
IKK5.1	Kualitas penyelengaraan dukungan teknis transportasi darat
IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat